

**DAFTAR BACAAN**

**BUKU**

- Brotodijardjo, Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi Kelima, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, *Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Kementerian Keuangan RI, Jakarta, 2019.
- Djaenuri, Aries, Siti Aisyah, *Modul 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Negara RI menurut UUD 1945*, Universitas Terbuka, 2014.
- Efendi, Muhammad Bakhrun, *Kebijakan Perpajakan di Indonesia: Dari Era Kolonial Sampai Era Orde Baru*, Alinea Pustaka, Sleman, 2006.
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1993.
- Halim, Abdul, *Analisis Investasi*, Edisi kedua, Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- Ilyas, Wirawan B., Richard Burton, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2008.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi 3*, Penerbit ANDI, Jakarta, 1995.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cet.13, 2017.
- Munawir, S., *Pokok-pokok Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*, Bina Citra, Jakarta, 1983.
- Soemitro, Rochmat, *Asas Dan Dasar Perpajakan*, Cet. VII, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Suandi, Erly, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2008.

Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2004.

Sutrisno, Deddy, Indrawati, *Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Pajak*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2009.

### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950).

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2010 Nomor 64).

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 19).

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 251).

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 90).

Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05).

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58).

### **JURNAL**

Arifin, Moch. Samsul, Margareta Rahayuningsih, Sri Ngabekti, Distribusi Walet (*Collacallia Sp*) di Kabupaten Grobogan, *Unnes Journal of Life Science*, Vol. 1, No. 1, 2012.

Ayuti, Turaina, Dani Garnida, Indrawati Yudha Asmara, Identifikasi Habitat Dan Produksi Sarang Burung Walet (*Collocalia Fuciphaga*) di Kabupaten Lampung Timur, *Jurnal Unpad*, Vol. 5, No.4, 2016.

Mardiana, ‘Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin’, *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu*, Vol. VI, No. 1, 2017.

### **SKRIPSI**

Ningrum, Tsamara Probo, *Penghindaran Pajak Oleh Perusahaan Asing Penyedia Layanan Aplikasi dan Konten Berbasis Internet Sebagai Wajib Pajak Dalam Bentuk Usaha Tetap*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2019.

### **SURAT KABAR**

Hamim, Muhammad, “Terapkan Perda Nomor 6 Tahun 2018, Pajak Sarang Burung Walet Turun Jadi 5%”, <https://www.borneonews.co.id/berita/112866-terapkan-perda-nomor-6-tahun-2018-pajak-sarang-burung-walet-turun-jadi-5>, 03 Januari 2019, dikunjungi pada 29 Oktober 2019.

### **INTERNET**

- Gumilar, Pandu, “Ini Deretan Daerah Potensial Penghasil Sarang Walet”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180303/99/745469/ini-deretan-daerah-potensial-penghasil-sarang-walet>, 3 Maret 2018, dikunjungi pada 11 Oktober 2019.
- JDIH BPK RI, “Database Peraturan : Pajak Sarang Burung Walet”, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/22469/perda-kab-musi-banyuasin-no-9-tahun-2010>, dikunjungi pada 13 Oktober 2019.
- Perkumpulan Pengusaha Sarang Burung Indonesia, “Profil PPSBI”, <http://www.ppsbi.org/home/about>, dikunjungi pada 21 Oktober 2019.
- Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, “Profil : Geografis”, <https://mubakab.go.id/geografis/>, dikunjungi pada tanggal 15 Agustus 2019.
- Sistem Informasi Pelayanan BPPRD Kabupaten Muba, “Dashboard Realisasi Tahun 2019”, <http://bpprd.mubakab.go.id/monitoring/>, dikunjungi pada tanggal 15 Agustus 2019.
- Sistem Informasi Pelayanan BPPRD Kabupaten Muba, “Pajak Sarang Walet”, [http://bpprd.mubakab.go.id/pajak?t\\_idpajakdaerah=7](http://bpprd.mubakab.go.id/pajak?t_idpajakdaerah=7), dikunjungi pada 13 Oktober 2019.
- Situngkir, Sondang Edward, Penegakan Hukum Bidang Perpajakan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kota Pontianak), <https://media.neliti.com/media/publications/210024-penegakan-hukum-bidang-perpajakan-dalam.pdf>, diakses pada Rabu 01 Januari 2020.
- Soebroto, Arif Christiono, “Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas”, [http://birohukum.bappenas.go.id/data/data\\_berita/WORKSHOP%20Peraturan%20kebijakan%20di%20Kementerian%20PPN%20%20bappenas.pdf](http://birohukum.bappenas.go.id/data/data_berita/WORKSHOP%20Peraturan%20kebijakan%20di%20Kementerian%20PPN%20%20bappenas.pdf), 8 Juni 2011, h.2, diakses pada Kamis 10 Oktober 2019.
- Sucipto, Purnomo, “Mengapa Undang-Undang Perlu Peraturan Pelaksanaan?”, <https://setkab.go.id/mengapa-undang-undang-perlu-peraturan-pelaksanaan/>, 11 Maret 2015, diakses pada Kamis 10 Oktober 2019.